

**Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran
Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap
Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur**

(Tahun 2010-2015)

JURNAL



Oleh:

Nama : Dita Sekar Ayu

Nomor Mahasiswa : 14313336

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2018**

**Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran
Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap
Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur
(Tahun 2010-2015)**

Dita Sekar Ayu

Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Email : ditasekar96@gmail.com

ABSTRAKSI

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang kompleks dan multidimensional. Oleh karenanya dibutuhkan solusi untuk mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen Produk Domestik Regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, yakni dalam berbagai cetakan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Timur Berbagai Terbitan tahun 2010-2015. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah Fixed Effects, karena model Fixed Effects lebih baik dibandingkan dengan model yang lain, yang telah diuji menggunakan uji F dan uji Hausman. Hasil menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, sementara variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : Jumlah Penduduk Miskin, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk, UMK dan Fixed Effects

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang besar, mayoritas tinggal di daerah perdesaan yang sulit untuk diakses bahkan kota besar seperti Jakarta juga masih sangat banyak ditemukan masyarakat miskin. Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan berbagai penyebab salah satunya adalah rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Persoalan kemiskinan juga dapat dipicu karena masih rendahnya kualitas hidup manusia, upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, dan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat setiap tahun nya.

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, permasalahan kemiskinan adalah suatu masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya untuk pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk.,2008).

Selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia yang cenderung berpusat di Pulau Jawa, tetapi fakta nya muncul masalah kemiskinan yang berpusat di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Berikut data jumlah penduduk miskin di beberapa Provinsi di Pulau Jawa dapat di

lihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1 dibawah ini dapat di lihat bahwa tingkat kemiskinan nasional mengalami fluktuasi dalam enam tahun terakhir, pada tahun 2010 tingkat kemiskinan nasional mencapai angka 13,33% selanjutnya pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 12,49% kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2012 sebesar 11,66% dan pada dua tahun berikutnya menjadi 11,46% pada tahun 2013, dan menjadi 10,96% pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan kembali menjadi 11,22%.

Tabel 1 : Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa (%)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
DKI	3,48	3,75	3,7	3,72	4,09	3,61	3,73
Jawa Barat	11,27	10,65	9,89	9,61	9,18	9,57	10,03
Banten	7,16	6,32	5,71	5,89	5,51	5,75	6,06
Jawa Tengah	16,56	15,76	14,98	14,44	13,58	13,32	14,77
DIY	16,83	16,08	15,88	15,03	14,55	13,16	15,26
Jawa Timur	15,26	13,85	13,08	12,73	12,28	12,28	13,25
Nasional	13,33	12,49	11,66	11,46	10,96	11,13	11,84

Sumber: BPS RI, 2015

Berdasarkan data presentase jumlah penduduk miskin di pulau Jawa, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan 6 provinsi di Pulau Jawa masih tidak merata, dan sebagian besar tingkat kemiskinan diatas 10%, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur, sedangkan DKI Jakarta dan Provinsi Banten di bawah 10%. Jika dibandingkan dengan presentase jumlah penduduk miskin secara nasional dari tahun 2010 – 2015 , Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada urutan pertama, Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan kedua, kemudian Provinsi Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan angka 12,28%. Angka ini masih diatas tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,13 %.

Presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren menurun meskipun berfluktuasi dan tidak terlalu signifikan pada perkembangannya, dengan penurunan tingkat kemiskinan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasarkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2015), presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 15,66% dan pada tahun 2011 sebesar 13,85%. Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 masing-masing sebesar 12,73% ,12,28%, dan pada tahun 2015 bulan Maret sebesar 12,34% kemudian pada bulan September mengalami penurunan menjadi 12,28%. Meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah kemiskinan, namun presentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih lebih tinggi di banding presentase kemiskinan nasional, sehingga diperlukan usaha pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

B. KAJIAN PUSTAKA

Rusdarti dan Lesta (2013) meneliti data sekunder dengan menggunakan variabel dependen kemiskinan dan variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa variabel PDRB, dan belanja publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Saputra (2011) meneliti menggunakan data sekunder dengan menggunakan variabel dependen tingkat kemiskinan dan variabel independen jumlah penduduk, PDRB, IPM, dan pengangguran. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Pratama (2014) meneliti menggunakan data sekunder dengan menggunakan variabel dependen tingkat kemiskinan dan variabel independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi, pendapatan, dan konsumsi. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara negatif, inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dan untuk variabel pendapatan dan konsumsi memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Suliswanto (2010) meneliti menggunakan data sekunder dengan menggunakan variabel dependen kemiskinan dan variabel independen produk domestik regional bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada penelitian ini menggunakan alat analisis data panel. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel produk domestik regional bruto (PDRB) dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

C. LANDASAN TEORI

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan kepemilikan faktor produksi, maupun kualitas faktor produksi yang tidak memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Masalah kemiskinan ini sudah menjadi suatu hal yang fenomenal di Negara berkembang khususnya Negara Indonesia, dikarenakan rendahnya penghasilan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri.

a. Ukuran Kemiskinan

Arsyad (2004) dalam mengukur kemiskinan dibagi dua macam cara yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif :

1. Kemiskinan Absolut

Yaitu adalah ukuran yang mengaitkan kemiskinan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Apabila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Kesulitan utama dalam konsep pengukuran kemiskinan secara absolute adalah dengan menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena keduanya tidak hanya di pengaruhi oleh faktor adat istiadat

saja melainkan juga diakibatkan oleh iklim dan faktor ekonomi lainnya.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan ini disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Menurut beberapa pakar berpendapat bahwa jika pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan lingkungan sekitarnya, maka orang tersebut masuk dalam kategori orang miskin.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut BPS (2013) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit produksi baik berupa barang dan jasa dalam suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga setiap tahunnya, digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi yang ada.

Produk Domestik Regional Bruto terdiri dari dua macam cara penyajian, yaitu :

1. PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, baik pada

saat menghitung atau menilai produksi, biaya antara , ataupun nilai tambah.

2. PDRB atas dasar harga konstan

PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan atau tahun dasar, baik pada saat menghitung atau menilai produksi, biaya antaa, maupun komponen nilai tambah.

3. Tingkat Pengangguran

Secara umum pengertian pengangguran adalah orang yang belum memiliki pekerjaan tetap atau angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi angka pengangguran maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi penduduk yang kurang baik, karena tidak semua angkatan kerja telah memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menunjukkan bahwa penduduk tersebut hanya berfungsi sebagai konsumen tetapi tidak berfungsi sebagai faktor input produksi yang dapat menghasilkan output. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Pengangguran dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu :

- a.) Pengangguran Terbuka, menurut BPS pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari

pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

- b.) Setengah Menganggur, yaitu adalah penduduk atau angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tidak termasuk yang bekerja sementara.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelegualitas dan standar hidup layak. Saat perencanaan pembangunan, IPM juga berfungsi memberikan tuntunan menentukan prioritas dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program.

4. Jumlah Penduduk

Dalam teori perangkap penduduk Malthus. Kemiskinan disebabkan oleh adanya perbedaan proporsi antara pertumbuhan persediaan pangan dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan per kapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten.

5. Upah Minimum

Upah minimum sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjaannya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006). Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro.

D. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara data *cross section* dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan *times series* dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, penulis mengumpulkan data dari data-data yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dalam berbagai tahun publikasi. Data yang diperoleh akan diolah dan di analisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode regresi data

panel. Model dasar yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon_t$$

Dimana :

Y_{it}	= Jumlah Penduduk Miskin i tahun t (jiwa)
X_{1it}	= Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten i tahun t (milyar rupiah)
X_{2it}	= Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten i tahun t (persen)
X_{3it}	= Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten i tahun t (persen)
X_{4it}	= Jumlah Penduduk Kabupaten i tahun t (jiwa)
X_{5it}	= Upah Minimum Kabupaten i tahun t (rupiah)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	= Koefisien variabel independen
ε_t	= Variabel Pengganggu

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.) Pemilihan Model

- a.) Uji Chow : Metode ini dilakukan untuk membandingkan pemilihan model yang lebih baik antara *common effect* atau *fixed effect model*.

H_0 : Common Effect, jika nilai Probabilitas F statistiknya tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$.

H_1 : Fixed Effect, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikansi pada $\alpha = 5\%$.

Tabel 2 : Hasil Regresi Uji Chow dengan *Redundant Test*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	183.093670	(37,185)	0.0000
Cross-section Chi-square	827.070495	37	0.0000

Sumber : Data diolah Eviews 9

Nilai probabilitas cross section F sebesar 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam menguji hipotesis adalah model fixed effect. Dari hasil pengujian diatas, maka akan ditentukan apakah akan menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*.

b.) Uji Hausman : Digunakan untuk memilih model antara *Fixed Effects* atau *Random Effects*

H_0 : *Random Effect*, jika nilai Chi-squarenya tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$.

H_1 : *Fixed Effect*, jika nilai Chi-squarenya signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Tabel 3 : Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	61.567312	5	0.0000

Sumber : Data diolah Eviews 9

Berdasarkan Tabel 3 diatas, diperoleh nilai distribusi chi-square sebesar 61.567312 dengan probabilitas chi-square 0.0000 dimana lebih

kecil dari alpha 0.05 ($0.0000 < 0.05$) maka model yang tepat untuk digunakan adalah *fixed effect model*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model terbaik yang digunakan Fixed Effects. Model ini dipilih karena model Fixed Effects lebih baik dibandingkan dengan model lain yang telah diuji dengan menggunakan uji F (Uji Chow) dan Uji Hausman.

2.) Pengujian Statistik

a.) Estimasi *Fixed Effects*

Estimasi *fixed effects* adalah teknik pengestimasi dengan menggunakan variabel *dummy* penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data.

Tabel 4 : Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	797.4912	49.03964	16.26217	0.0000
X ₁	-0.000195	0.000836	-2.326902	0.0211
X ₂	-1.093912	0.349438	-3.130489	0.0020
X ₃	-6.585930	0.494774	-13.31098	0.0000
X ₄	-0.000228	0.000434	-5.238503	0.0000
X ₅	0.0000169	0.000286	5.912276	0.0000
R-squared	0.996289	Prob(F-statistic)		0.000000
Adjusted R-squared	0.995446	S .D. dependent var		80.34600
F-statistic	1182.521	Durbin-Watson stat		1.058675

Sumber : Data diolah Eviews 9

Bentuk persamaan sebagai berikut :

$$Y = 797.4912 - 0.000195 X_1 - 1.093912 X_2 - 6.585930 X_3 - 0.000228 X_4 + 0.0000169 X_5 + e$$

Dimana :

X₁ = Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur (jiwa)

- X_2 = Produk Domestik Regional Bruto (milyar rupiah)
- X_3 = Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur (persen)
- X_4 = Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur (jiwa)
- X_5 = Upah Minimum kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur (rupiah)

b.) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen JPM dapat dijelaskan oleh variabel independen PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum kab/kota (UMK). Dari hasil regresi menggunakan model fixed effect, nilai R^2 sebesar 0.996289, artinya adalah variabel dependen JPM dapat dijelaskan oleh variabel independen PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum kab/kota (UMK) sebesar 99.6 % dan sisanya sebesar 0.4 % dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

c.) Uji t-statistik

1.) Pengujian terhadap variabel PDRB

Berdasarkan hasil diatas, PDRB memiliki nilai koefisien sebesar -0.000195 dengan nilai t-hitung -2.326902 dan nilai probabilitas sebesar 0.0211. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0211 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel PDRB (X_1) signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

2.) Pengujian terhadap variabel Tingkat Pengangguran (TPT)

Berdasarkan hasil diatas, TPT memiliki nilai koefisien -1.093912 dengan nilai t-hitung -3.130489 dan nilai probabilitas sebesar 0.0020. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0020 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel TPT (X_2) signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

3.) Pengujian terhadap variabel IPM

Berdasarkan hasil diatas, IPM memiliki nilai koefisien -6.585930 dengan nilai t-hitung -13.31098 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel IPM (X_3) signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

4.) Pengujian terhadap variabel Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil diatas, jumlah penduduk memiliki nilai koefisien -0.000228 dengan nilai t-hitung -5.238503 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel jumlah penduduk (X_4) signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

5.) Pengujian terhadap variabel UMK

Berdasarkan hasil diatas, UMK memiliki nilai koefisien 0.00000169 dengan nilai t-hitung 5.912276 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0.05$) sehingga

secara statistik variabel UMK (X_5) signifikan dan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.

d.) Uji F – statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai F-hitung berdasarkan hasil regresi diatas sebesar 1182.521 dengan probabilitas sebesar $0.000000 < \alpha = 5\%$ sehingga secara statistik model estimasi *fixed effect* variabel independen PDRB, TPT, IPM, jumlah penduduk dan UMK secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen jumlah penduduk miskin (Y).

e.) Analisis Intersep

Dari Tabel 5 dibawah ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember memiliki nilai intersep yang tinggi, sehingga apabila diasumsikan seluruh variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh, maka Kota Surabaya, Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi, artinya memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah dibandingkan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur. Pada Kota Batu dan Kota Mojokerto memiliki nilai intersep yang paling rendah, apabila diasumsikan seluruh variabel independen dalam penelitian tidak berpengaruh, maka Kota Batu dan Kota Mojokerto memiliki tingkat

kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 5 : Hasil Intersep

Kabupaten/Kota	Koefisien	Koefisien Kabupaten/Kota	Intersep
Kabupaten Pacitan	797.4912	-174.4662	623.0250
Kabupaten Ponorogo	797.4912	-67.9207	729.5705
Kabupaten Trenggalek	797.4912	-124.1889	673.3023
Kabupaten Tulungagung	797.4912	-29.8426	767.6486
Kabupaten Blitar	797.4912	11.21142	808.7026
Kabupaten Kediri	797.4912	196.6141	993.6322
Kabupaten Malang	797.4912	478.9417	1276.4329
Kabupaten Lumajang	797.4912	-42.8508	754.6404
Kabupaten Jember	797.4912	425.9294	1250.4206
Kabupaten Banyuwangi	797.4912	150.2406	947.7318
Kabupaten Bondowoso	797.4912	-109.3016	688.1896
Kabupaten Situbondo	797.4912	-150.9307	646.5605
Kabupaten Probolinggo	797.4912	100.5803	898.0715
Kabupaten Pasuruan	797.4912	141.1320	938.6232
Kabupaten Sidoarjo	797.4912	297.5411	1095.0323
Kabupaten Mojokerto	797.4912	1.601592	799.0928
Kabupaten Jombang	797.4912	65.49213	862.9833
Kabupaten Nganjuk	797.4912	17.10959	814.6008
Kabupaten Madiun	797.4912	-119.2904	678.2008
Kabupaten Magetan	797.4912	-131.1212	666.3700
Kabupaten Ngawi	797.4912	-45.2973	752.1939
Kabupaten Bojonegoro	797.4912	104.2690	901.7602
Kabupaten Tuban	797.4912	74.99968	872.4909
Kabupaten Lamongan	797.4912	107.4856	904.9768
Kabupaten Gresik	797.4912	122.3586	919.8498
Kabupaten Bangkalan	797.4912	29.09206	826.5833
Kabupaten Sampang	797.4912	23.90021	821.3914
Kabupaten Pamekasan	797.4912	-58.4598	739.0314
Kabupaten Sumenep	797.4912	61.06767	858.5589
Kota Kediri	797.4912	-222.1071	575.3841
Kota Blitar	797.4912	-277.3677	520.1235
Kota Malang	797.4912	-55.2591	742.2321
Kota Probolinggo	797.4912	-274.0064	523.4848
Kota Pasuruan	797.4912	-276.9188	520.5724
Kota Mojokerto	797.4912	-281.2793	516.2119
Kota Madiun	797.4912	-242.8482	554.6430
Kota Surabaya	797.4912	567.4984	1364.9896
Kota Batu	797.4912	-293.6085	503.8827

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model estimasi yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect dimana hasil koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka mendekati 1 (satu) yaitu 0.996289 yang mana hasil dari regresi tersebut memiliki arti bahwa variabel jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan upah minimum Kabupaten/Kota.
2. Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat disimpulkan semakin tinggi PDRB maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur akan menurun.
3. Variabel TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan karena tidak semua orang yang menganggur itu selalu miskin.
4. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan karena naiknya IPM Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun sehingga meningkatnya IPM mampu mengurangi penduduk miskin.
5. Variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan karena

jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, dimana tingkat kelahiran penduduk masih sangat tinggi, sedangkan tingkat kematiannya juga masih tinggi namun relatif sudah jauh lebih rendah.

6. Variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan karena karena Provinsi Jawa Timur memiliki sumber perekonomian yang besar di sektor pertanian, jasa, dan perdagangan, dimana sektor pertanian dan jasa adalah sektor informal dan pada sektor informal ini masih belum bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.

G. IMPLIKASI

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan PDRB akan menurunkan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu agar peningkatan PDRB dapat lebih dirasakan oleh penduduk miskin, maka kebijakan yang seharusnya dilakukan adalah meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi diharapkan bisa mengurangi tingkat pengangguran dan pendapatan masyarakat bisa bertambah sehingga kemiskinan bisa berkurang. Sektor yang paling dominan untuk dikembangkan adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan. Karena ketiga sektor ini merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian (PDRB) Provinsi Jawa Timur.

2. Berdasarkan hasil penelitian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih menggerakkan sektor informal, karena pengangguran dalam penelitian ini menggunakan data pengangguran terbuka yang mana di dalamnya terdapat golongan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, menyiapkan usaha atau sudah mendapatkan pekerjaan namun belum mulai bekerja yang masuk dalam golongan pengangguran. Pentingnya peningkatan pada sektor informal untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Karena sektor informal merupakan salah satu solusi masalah dalam mengatasi pengangguran.
3. Berdasarkan hasil penelitian, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin hal ini mengindikasikan bahwa faktor kesehatan, pendidikan serta daya beli masyarakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat memberikan pelayanan di sektor pendidikan secara gratis khususnya bagi masyarakat miskin. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga masih perlu ditingkatkan dengan pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas khususnya pada masyarakat desa miskin dan tertinggal.
4. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin. Untuk itu hendaknya pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur lebih memperhatikan laju pertumbuhan penduduk di desa, karena angka kelahiran di desa lebih besar dari pada di

kota, sehingga fokus utama program Keluarga Berencana (KB) lebih baik di lakukan di desa.

5. Berdasarkan hasil penelitian, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin. Untuk itu kebijakan penetapan upah minimum harus tetap dilakukan dan tingkat upahnya dinaikkan sesuai KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk melindungi pekerja dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvonita, dkk (2014), "Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau", JOM FEKON, Vol.1 No.2, Oktober 2014
- Arsyad, Lincolin (2004), Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (2008-2017), Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, Berbagai Edisi. BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik (2015), "Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Timur Berbagai Terbitan", Badan Pusat Statistik, Jawa Timur.
- Feriyanto, Nur (2014), Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Indonesia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad (2004), Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Nasir, M., Muh, Saichudin dan Maulizar (2008), "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. Jurnal Eksekutif, Vol. 5, No. 4
- Pratama, Y.C (2014), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.4, No. 2.

- Rusdati, & Lesta, K.S (2013), “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal *Economia*
- Saputra, W.A (2011), “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”. Universitas Diponegoro.
- Sukirno, Sadono (2006), *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suliswanto, M (2010), “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.8, No. 2.
- Sumarsono, Sonny (2003), *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus (2009), *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Edisi ketiga*, Ekonisia, Jakarta.
- Wongdesmiwati, (2009), *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Diakses 6 Desember 2017, dari http://wondesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-_analisis-ekonometri_.pdf

